

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia yang sangat pesat menuntut perubahan pola pikir tiap individu untuk bekerja lebih keras agar mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi guna menjamin kebutuhan individu tersebut serta terhindar dari masalah kesulitan ekonomi. Beberapa orang mencari pekerjaan yang bisa memberikan tunjangan-tunjangan lain selain pendapatan pokoknya disetiap bulan. Pegawai Negeri Sipil atau yang sering disebut dengan PNS adalah salah satu kelompok kerja yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. PNS merupakan abdi negara yang menjadi tanggungan pemerintah dalam hal gaji, tunjangan, dan dana pensiun. Oleh sebab itu, banyak orang yang berminat untuk menjadi PNS dikarenakan sudah terdapat jaminan-jaminan seperti asuransi dan dana pensiun. Selain itu, sistem penggajian dari PNS yang terjamin karena gaji para PNS tersebut berasal dari APBN bukan dari perusahaan/instansi.

PNS tidak hanya mendapat gaji yang telah diatur dalam APBN, akan tetapi PNS juga mendapatkan pendapatan setelah pensiun yakni dana pensiun. Program dana Pensiun adalah program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah ([www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)). Dana pensiun merupakan potongan dari pendapatan yang diterima PNS perbulan selama yang bersangkutan masih terikat dalam pekerjaan sebagai seorang PNS. Selain itu PNS akan mendapatkan jaminan sosial untuk kesejahteraan PNS tersebut yakni dengan memberikan jaminan keuangan jika PNS tersebut mendapat resiko yang mengakibatkan PNS tersebut tidak mampu bekerja kembali dikarenakan sudah sampai pada batas usia produktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Asti (2017) menyatakan bahwa Program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakat, khususnya untuk karyawan pemerintah. Program ini merupakan sarana dalam menjamin arus

penerimaan pendapatan bagi pekerja dan keluarganya dari resiko sosial ekonomi yang dapat dialami oleh pekerja tersebut, Resiko sosial ekonomi yang ditangani oleh program ini terbatas, yaitu jika terjadi kecelakaan kerja, usia lanjut, dan meninggal dunia, yang mengakibatkan dibutuhkan perawatan medis, berkurangnya atau terputusnya pendapatan tenaga kerja.

Mekanisme pengelolaan dan pembayaran dana pensiun dan jaminan sosial bagi para PNS membutuhkan sistem yang baik. Sistem adalah suatu bentuk hubungan antara satu komponen dengan komponen lain karena sistem mempunyai tujuan yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi dalam sistem tersebut Menurut Mulyadi (2016) Secara umum Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dady (2017) menyatakan bahwa setiap perusahaan/instansi harus memiliki sistem informasi yang baik dan memadai dalam menjalankan perusahaannya hal bertujuan agar perusahaan mampu membuat keputusan dengan baik. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam suatu perusahaan bertujuan untuk mengatur jalannya semua aktivitas perusahaan baik yang bersifat operasional maupun non operasional sangatlah penting. Dengan adanya sistem informasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk memantau perkembangan perusahaan.

Penyelenggaraan klaim tentunya membutuhkan prosedur yang tepat serta terarah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga tercipta aliran kas keluar. Irdanasari (2021) menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana dari peserta yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada peserta, perusahaan harus memiliki prosedur dan sistem akuntansi yang baik hal ini bertujuan agar nantinya dapat tercipta pengendalian dan mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan oleh perusahaan.

PT Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua (THT) ,dana pensiun, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) dengan kepesertaan mencakup ASN (Aparatur Sipil Negara), Pejabat Negara, dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak). Program tabungan hari tua

(THT) adalah program asuransi yang terdiri atas asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambahkan dengan jaminan kecelakaan kerja (JKK) ataupun jaminan kematian (JKM). Jaminan kecelakaan kerja (JKK) akan diberikan jika PNS aktif mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan perawatan maupun kecacatan, sedangkan jaminan kematian (JKM) diberikan jika PNS aktif meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja. ([www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id))

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 disebutkan bahwa TASPEN mengelola program Jaminan Kematian (JKM) yang merupakan perlindungan atas resiko kematian bukan akibat dari kecelakaan kerja (<https://www.taspen.co.id/layanan/jkm>). Jaminan kematian (JKM) diberikan kepada ahli waris PNS aktif meninggal dunia seperti istri/suami dari PNS aktif meninggal dunia, anak dari PNS aktif meninggal dunia ataupun orang tua/keluarga dari PNS aktif meninggal dunia dengan catatan PNS aktif tersebut tidak memiliki istri/suami/anak.

Pelaksanaan pembayaran jaminan kematian (JKM) PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bandar Lampung membutuhkan sistem pengeluaran kas yang baik dengan tujuan mengendalikan aktivitas pembayaran jaminan kematian yang sesuai dengan prosedur pengeluaran kas yang telah ditetapkan. Pembayaran jaminan kematian (JKM) pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bandar Lampung terkadang terdapat masalah seperti terhambatnya sistem pengeluaran kas yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti terlambatnya proses penginputan terkait data pengajuan pencairan klaim, hal ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang melakukan proses penginputan data, pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bandar Lampung ini proses penginputan data dilakukan oleh satu orang sehingga terkadang memerlukan waktu yang cukup lama dalam penginputan karena jumlah pengusul pencairan klaim yang banyak. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengolahan voucher dari bagian pelayanan ke bagian keuangan. Kendala lain yang menghambat proses pembayaran klaim adalah berasal dari pengusul seperti kurangnya dokumen persyaratan pengajuan klaim yang mengakibatkan dokumen yang tidak lengkap harus dikembalikan kepada peserta ahli waris untuk kemudian dilengkapi dan menyebabkan proses

pembayaran tertunda sampai dokumen tersebut lengkap kemudian siap untuk diproses.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bandar Lampung dan mengangkat judul “Analisis Sistem Informasi Pembayaran Klaim Atas Jaminan Kematian (JKM) Bagi Keluarga PNS Aktif Meninggal Dunia PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bandar Lampung”.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Sistem Informasi Pembayaran Klaim Jaminan Kematian (JKM) Bagi Keluarga PNS Aktif Meninggal Dunia PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bandar Lampung apakah telah sesuai dengan teori sistem akuntansi pengeluaran kas yang dikemukakan oleh Mulyadi (2016).

## **1.3 Kerangka Pemikiran**

Jaminan Kematian (JKM) adalah produk jasa keuangan PT Taspen (Persero), Langkah awal yang akan dilakukan yaitu memahami dokumen-dokumen yang terkait pembayaran klaim manfaat jaminan kematian (JKM), dokumen tersebut yaitu formulir permintaan pembayaran dan pendaftaran, lembar perhitungan hak, tanda terima berkas SPP (Surat Permintaan Pembayaran), *voucher* klaim, surat keterangan meninggal dunia, untuk mempermudah dalam pembuatan bagan alir.

Langkah selanjutnya yaitu penulis akan mengevaluasi sistem informasi akuntansi pembayaran klaim jaminan kematian PT Taspen (persero) Kantor Cabang Bandar Lampung apakah sesuai dengan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang baik. Dalam hal ini penulis menggunakan teori sistem pengeluaran kas yang dikemukakan oleh Mulyadi (2016). Selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan apakah sistem informasi pembayaran klaim jaminan kematian PT Taspen (Persero) KC Bandar Lampung sudah sesuai dengan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas menurut Mulyadi (2016).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 1.4 Kontribusi

### 1.4.1 Bagi Penulis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam pelaksanaan pengurusan Jaminan Kematian (JKM) Keluarga Pensiun.
2. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan berkomunikasi

### 1.4.2 Bagi PT Taspen (Persero) KC Bandar Lampung

1. Sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan citra PT Taspen (Persero) KC Bandar Lampung..
2. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam perlakuan akuntansi terhadap Jaminan Kematian (JKM) Keluarga Pensiun.

### 1.4.3 Bagi Pembaca

1. Menambah wawasan pembaca terkait sistem pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM).
2. Dapat dijadikan referensi bagi pembaca dalam penyusunan tugas akhir terkait sistem pengeluaran kas terhadap pembayaran Jaminan Kematian (JKM) pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bandar Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sistem Informasi Akuntansi

#### 2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi (2016), secara umum Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu,

Menurut Krismiaji (2020), informasi adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai suatu rangkaian tujuan, sebuah sistem memiliki tiga karakteristik yaitu:

1. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan.
2. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem.
3. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut.

#### 2.1.2 Pengertian Informasi

Menurut Susanto (2017). informasi adalah hasil dari pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat, akan tetapi tidak semua hasil pengolahan data tersebut bisa menjadi informasi, hasil dari pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah sebuah informasi. Dari uraian tentang informasi ini ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Informasi Merupakan hasil dari pengolahan data.
2. Memberikan makna atau arti.
3. Berguna atau bermanfaat.

#### 2.1.3 Pengertian Akuntansi

Menurut Warren (2018), akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut (Taswan, 2015) dalam (Dady, et al., 2017), akuntansi adalah seni, ilmu, sistem informasi yang didalamnya terdapat pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara yang tepat serta dalam satuan transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan yang kemudian disajikan dalam laporan keuangan.

#### 2.1.4 Pengertian sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

#### 2.1.5 Tujuan Umum Pengembangan Sistem Akuntansi

Mulyadi (2016) menyebutkan bahwa tujuan dari pengembangan sistem akuntansi adalah :

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

## 2.2 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

### 2.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Menurut Mulyadi (2016), sistem akuntansi pengeluaran terdapat dua jenis yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek erat hubungannya dengan sistem pencatatan *account payable* dan *voucher payable*. Sedangkan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai terdiri dari dua jenis yaitu sistem dana kas kecil dengan

*fluctuating-fund-balance system* dan *imprest system*. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (biasanya karena jumlahnya relatif kecil). dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem: *fluctuating-fund-balance system* dan *imprest system*. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian internal berikut ini:

1. Dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Dengan demikian pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar.
2. Dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank, yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank (*bank statement*) kepada perusahaan nasabahnya. Rekening koran bank inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi kas perusahaan yang direkam di dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Jika sistem perbankan mengembalikan *cancelled check* kepada *check issuer*, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya *cancelled check* sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan digunakannya cek dalam pengeluaran kas, *check issuer* akan secara otomatis menerima tanda penerimaan kas dari pihak yang menerima pembayaran. *Cancelled check* sebagai tanda terima pembayaran lebih andal karena di dalam *endorsement* terkait pihak bank yang merupakan pihak yang independen bagi pembayar maupun bagi penerima pembayaran.

#### 2.2.2 Dokumen yang digunakan

Menurut Mulyadi (2016), dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yaitu :



1. Bukti Kas Keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada Bagian Kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Di samping itu, dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan (*remittance advice*) yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang.
2. Cek. Dari sudut sistem informasi akuntansi, cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Ada dua pilihan dalam penggunaan cek untuk pembayaran yaitu *check issuer* untuk membuat cek atas nama, dan *check issuer* untuk membuat cek atas unjuk.
3. Permintaan Cek (*Check Request*). Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi yang memerlukan kas menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi (Bagian Utang) untuk kepentingan pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini dibuat sebagai perintah pada fungsi keuangan untuk membuat cek sebesar jumlah yang tercantum di dalam dokumen tersebut.

### 2.2.3 Fungsi yang Terkait Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas.

Menurut Mulyadi (2016), fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah sebagai berikut :

1. Fungsi yang Memerlukan Pengeluaran Kas.  
 Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas (misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas), fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi (Bagian Utang). Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan *voucher payable system*, Bagian Utang kemudian membuat bukti kas keluar (*voucher*) untuk memungkinkan Bagian Kas mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas.

## 2. Fungsi Kas.

Dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur.

## 3. Fungsi Akuntansi.

Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas :

- a. Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan.
- b. Pencatatan pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran jurnal atau register jurnal.
- c. Pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut, serta berfungsi juga untuk melakukan verifikasi terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung sebagai dasar dalam pembuatan bukti kas keluar.

## 4. Fungsi Pemeriksa Intern.

Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas (cash count) secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi (akun Kas dalam buku besar). Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak (*surprised audit*) terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik.

### 2.2.4 Catatan Akuntansi yang digunakan.

Menurut Mulyadi (2016), catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah :

#### 1. Jurnal Pengeluaran Kas.

Dalam pencatatan utang dengan *account payable system*, untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap "LUNAS" oleh fungsi kas.

## 2. Register Cek.

Dalam pencatatan utang dengan *voucher payable system*, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal: register bukti kas keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat utang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Jika sistem perbankan mengembalikan *cancelled check* kepada *check issuer*, register cek ini digunakan pula untuk mencatat *cancelled check* yang telah dilakukan endorsement oleh penerima pembayaran.

### 2.2.5 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem.

Menurut Mulyadi (2016), jaringan prosedur yang membentuk sistem pengeluaran kas terdiri dari :

#### 1. Prosedur Pengeluaran Kas dengan Cek yang Memerlukan Permintaan Cek.

Jika pengeluaran kas timbul dari transaksi selain dari transaksi pembelian, dokumen pendukung seperti kontrak-kontrak pembelian jasa berada di tangan fungsi yang memerlukan jasa tersebut.

#### 2. Prosedur Permintaan Cek.

Dalam prosedur ini fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan dan dikirimkan ke fungsi akuntansi (Bagian Utang) sebagai dasar fungsi yang terakhir ini dalam pembuatan bukti kas keluar.

#### 3. Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar.

Berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem pembelian atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh fungsi akuntansi (Bagian Utang), dalam prosedur pembuatan bukti kas keluar, Bagian Utang membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sebesar jumlah rupiah yang tercantum pada dokumen tersebut dan mengirimkan cek

tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut.

4. Prosedur Pembayaran Kas.

Dalam prosedur ini, fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat yang berwenang, dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar

5. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas.

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat pengeluaran ko di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek.

2.2.6 Bagan Alir Sistem Pengeluaran Kas dengan Cek.

Menurut Mulyadi (2016), bagan alir sistem Pengeluaran Kas dibagi menjadi empat macam yaitu :

1. Bagan Alir Dokumen Sistem Pengeluaran Kas dengan Cek dalam *Account Payable*.

Dalam *account payable system* pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal pembelian dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber. Faktur dari pemasok kemudian dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dengan dokumen pendukung yang bersangkutan (surat order pembelian dan laporan penerimaan barang) oleh Bagian Utang berdasarkan tanggal jatuh temponya. Pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya diserahkan oleh Bagian Utang kepada Bagian Kasa. Bagian Kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur. Faktur dari pemasok dan dokumen pendukungnya diserahkan oleh Bagian Kasa kepada Bagian Jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam jurnal pengeluaran kas..

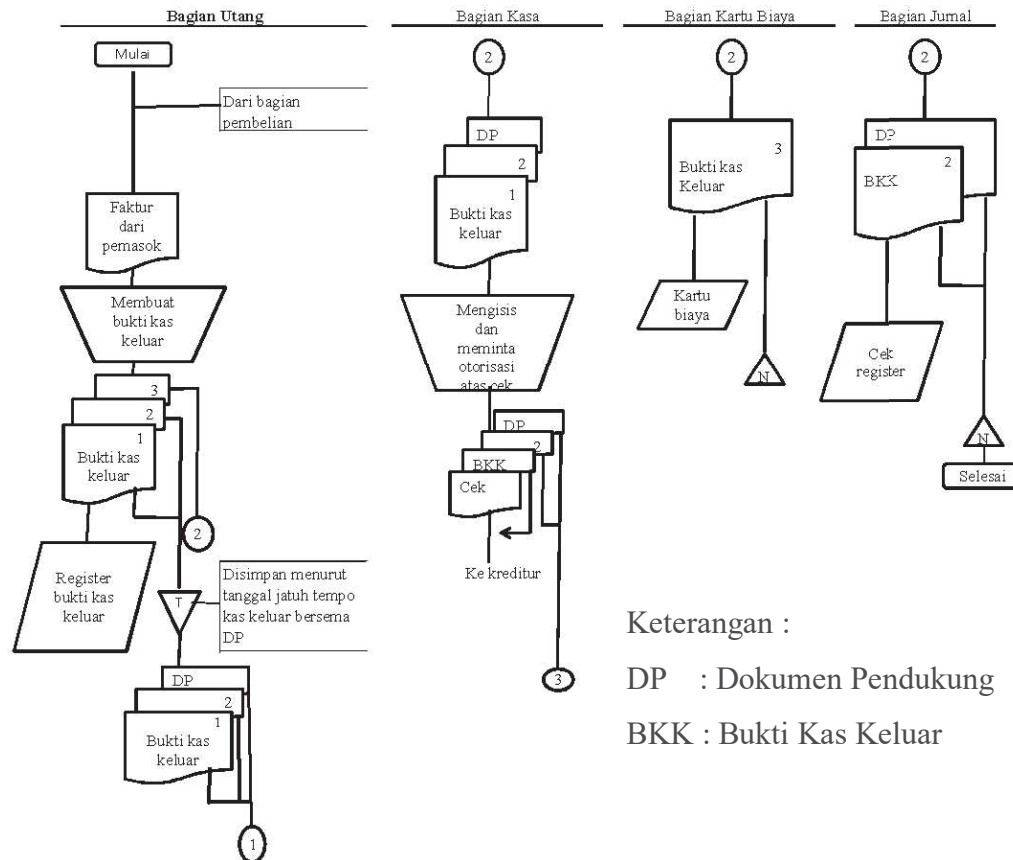
2. Bagan alir dokumen *Built-up voucher payable system*

Dalam sistem ini, satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. *Built-up voucher payable system* digunakan jika perusahaan melakukan pembayaran kepada krediturnya secara periodik. Misalnya perusahaan membuat perjanjian dengan para

pemasoknya untuk melakukan pembayaran utangnya pada tanggal 1 setiap bulan untuk pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam jangka waktu sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 bulan sebelumnya. Bukti kas keluar dibuat oleh Bagian Utang untuk mencatat faktur-faktur yang diterima dari pemasok dalam jangka waktu tertentu. Pada saat pembayaran yang dijadwalkan, Bagian Utang menjumlah rupiah faktur yang dicatat dalam bukti kas keluar.

3. Bagan alir dokumen *One-time voucher payable system* dengan *cash basis*.  
Dalam *voucher payable system-cash basis* ini pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar ke-3 yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya dibuatkan bukti kas keluar oleh Bagian Utang dan bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung (berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok) diserahkan kepada Bagian Kasa. Bagian Kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur dilampiri dengan bukti kas keluar lembar ke-1 sebagai surat pemberitahuan (*remittance advice*). Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh Bagian Kasa kepada Bagian Jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam register cek.
4. Bagan alir dokumen *One-time Voucher payable system* dengan *accrual basis (Full-Fledged Voucher System)*.  
Dalam *voucher payable-accrual basis* ini pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar ke-3 yang dibuat pada saat faktur dari pemasok diterima oleh Bagian Utang dari Bagian Pembelian. Pada saat jatuh tempo, oleh Bagian Utang bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung (berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok) diserahkan kepada Bagian Kasa. Bagian Kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok dilampiri dengan bukti kas keluar lembar ke-1 surat

pemberitahuan (*remittance advice*). Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh Bagian Kasa kepada Bagian Jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir in register cek Berikut ini adalah bagan alir dokumen *One-time Voucher payable system* dengan *accrual basis* (*Full-Fledged Voucher System*).



Gambar 2. Bagan alir dokumen *One-time Voucher payable system* dengan *accrual basis* (*Full-Fledged Voucher System*)

Sumber : Mulyadi (2016)

### 2.3 Jaminan Kematian

Menurut DJSN (2021), jaminan Kematian (JKM) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Menurut PP No. 44 tahun 2015 Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika ahli waris meninggal dunia bukan

dari akibat kecelakaan kerja. Kematian yang diakibatkan karena kecelakaan kerja bukan digolongkan kedalam Jaminan Kematian namun digolongkan sebagai Jaminan Kecelakaan Kerja.

Sedangkan menurut peraturan pemerintah RI No 70 tentang Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi aparatur sipil Negara pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

Berdasarkan (<https://www.taspen.co.id/layanan/detail-jkm>) Pengelolaan Iuran dan Pelaporan penyelenggaraan program JKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/ PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kepesertaan Program JKM dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara sampai dengan pegawai/ pejabat negara tersebut berhenti.

Peserta Jaminan Kematian (JKM) terdiri dari:

- a. Calon PNS dan PNS kecuali PNS Departemen Pertahanan Keamanan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- c. Pejabat Negara
- d. Pimpinan / Anggota DPRD

Hak-hak yang akan diterima oleh Peserta Jaminan Kematian (JKM) yaitu :

- a. Santunan Kematian
- b. Uang Duka Wafat
- c. Biaya Pemakaman
- d. Bantuan Beasiswa bagi anak peserta yang wafat

Ahli waris yang akan mengajukan klaim atas Jaminan Kematian (JKM) perlu untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan pengajuan, berkas-berkas tersebut adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari pemohon peserta dan ahli waris.  
Merupakan identitas dari ahli waris yang penting bagi peserta aktif pada PT Taspen. Taspen akan meminta fotokopi identitas terbaru yakni e-KTP jika belum memiliki e-KTP maka bisa diganti dengan surat pengantar dari kelurahan tempat ahli waris tinggal.
2. Surat Keterangan Kematian.  
Surat keterangan kematian harus berasal dari pejabat yang berwenang seperti Kepala Desa / Lurah / Rumah Sakit atau Akte kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3. Formulir Permintaan Pembayaran (FPP)  
Formulir ini disediakan oleh Taspen sebagai permintaan permohonan pembayaran untuk pembayaran Jaminan Kematian (JKM).
4. Fotokopi Surat Nikah.  
Untuk mengetahui apakah peserta Taspen sudah menikah atau belum serta apakah peserta Taspen tersebut masih memiliki tanggungan atau tidak.
5. Surat Kuasa Ahli Waris.  
Surat kuasa ahli waris harus yang sudah disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah tempat Peserta Taspen tersebut tinggal. Berkas ini juga sebagai bukti untuk Taspen bahwa ahli waris sudah menyerahkan surat kuasanya untuk proses pencairan Jaminan Kematian (JKM).
6. Fotokopi Kartu Kepegawaian.  
berkas ini berfungsi sebagai bukti bahwa peserta tersebut telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
7. Fotokopi KARIS/KARSU  
Kartu keterangan istri / kartu keterangan suami ini adalah kartu identitas suami / istri, jika status peserta Taspen tersebut sudah bercerai maka berkas ini tidak diperlukan. Berkas ini diminta Taspen untuk mengetahui apakah suami/istri tersebut masih dalam status CPNS/PNS.
8. Kartu Peserta Taspen.  
Kartu Peserta Taspen ini diserahkan oleh ahli waris ke PT Taspen sebagai bukti bahwa peserta tersebut adalah benar peserta aktif dari PT Taspen (Persero).



9. Kartu Keluarga.

Kartu Keluarga ini sangat penting karena Taspen dapat mengetahui berapa jumlah keluarga yang bersangkutan.

10. Surat Keterangan Sekolah atau Kuliah.

Surat keterangan sekolah atau kuliah ini ditujukan bagi anak yang masih menjadi tanggungan keluarga.

11. Pas foto terbaru ahli waris ukuran 3x4

Pas foto ini ditempel dan dibutuhkan untuk keperluan karip ataupun surat pengajuan Jaminan Kematian (JKM)

.